



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M PURNOMO
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG UMUM, KEUANGAN, DAN SUMBER DAYA
3. NHK : 694479

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.615.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/60 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/40 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/40 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/40 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m²/80 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 830.000.000
6. Tanah Seluas 350 m² di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
7. Tanah Seluas 1000 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
8. Tanah Seluas 10000 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 48.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, IZUSU ZENIA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 21.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	86.425.960
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.770.425.960
III. HUTANG	Rp.	330.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.440.425.960

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.